



Tulip 12 (1) (2023): 11-26

TULIP

(TULISAN ILMIAH PENDIDIKAN)

JURNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

<https://jurnal.ubest.ac.id>



IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN ISAK 35 TENTANG ORGANISASI KEAGAMAAN (STUDI KASUS DI MASJID AL-MI'RAJ KOTA KENDARI)

Yusuf Jaya Saputra¹, Mahmudin A. Sabilalo² dan Wa Ode Milawati AS³

^{1,2,3}, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Penulis korespondensi : yusufjayasaputra@yahoo.co.id¹,

mahmudinsabilalo@gmail.com², dan waodemilawatias@gmail.com³

ABSTRACT

His study aims to determine the Implementation of Financial Management Accountability and evaluate the Implementation of ISAK 35 at Al-Mi'raj Mosque, Kendari City. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques obtained by means of interviews and documentation. Data sources use primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews while the secondary data is in the form of weekly reports of the Kendari City Al-Mi'raj Mosque. The results of this study indicate that the implementation of financial management accountability at the Al-Mi'raj Mosque in Kendari City has been carried out transparently but still needs improvement in the future. The implementation of ISAK 35 in the management of the financial statements of the Al Mi'raj Mosque in Kendari City, this mosque has not made financial reports in accordance with the accounting standards applicable in Indonesia, namely ISAK 35, because in preparing the mosque's financial statements, this mosque still refers to the mosque's financial statements in general, namely only recording cash in and cash out.

Keywords: Accountability, Financial Statement, ISAK No. 35, Non Profit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan mengevaluasi Implementasi ISAK 35 pada Masjid Al-Mi'raj Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder nya berupa laporan mingguan Masjid Al-Mi'raj Kota Kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Mi'raj Kota Kendari sudah dilakukan secara transparan namun masih perlu adanya perbaikan untuk ke depannya. Implementasi ISAK 35 dalam pengelolaan laporan keuangan Masjid Al Mi'raj Kota Kendari, masjid ini belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu ISAK 35, karena dalam menyusun laporan keuangan masjid, masjid ini masih mengacu pada laporan keuangan masjid yang pada umumnya, yaitu hanya pencatatan berupa kas masuk dan kas keluar.

Kata kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, ISAK No. 35, Nirlaba.

PENDAHULUAN

Masjid adalah tempat beribadah bagi umat beragama Islam. Selain, digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga selalu digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan. Sehingga, masjid dapat diartikan sebagai tempat yang multifungsi. Dimana masjid bisa menjadi tempat umat Islam dalam melakukan segala aktivitas yang sifatnya bermanfaat dan positif seperti; aktivitas peribadatan, Taman Pembelajaran Al-Qur'an (TPA) atau yang sering dikenal sebagai tempat proses belajar-mengajar ilmu agama dan sering juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah (Zawawi & Ramli, 2016).

Semua aktivitas masjid baik itu aktivitas operasional, perenovasian masjid, pembangunan, dan lain-lain sudah tentu setiap pengurus diharuskan untuk melakukan proses pencatatan laporan keuangan untuk mengontrol setiap pendapatan dan juga pengeluaran yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang digunakan untuk memudahkan para penggunaanya dalam pengambilan keputusan (Hery, 2020:18). Selain untuk memudahkan pengambilan keputusan, laporan keuangan juga berguna sebagai upaya untuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas amanah dana yang telah diberikan (Andasari, 2016:145). Sehingga dengan adanya penyusunan laporan keuangan maka akan menambah kepercayaan pihak internal maupun pihak eksternal khususnya bagi para anggota, penyumbang (donatur) serta publik bahwa apa yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan dengan baik untuk kenyamanan orang-orang yang beribadah di dalam masjid tersebut.

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba (masjid) terdapat standar yang mengatur tentang

penyajian laporan keuangannya, yaitu ISAK No 35. Menurut ISAK 35 penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. ISAK 35 mulai diberlakukan per 1 Januari 2020 sebagai pengganti PSAK No. 45 melalui PPSK Nomor 13 yang dimulai dengan adanya penerbitan DE (Draft Eksplosur) pada 26 September 2018. Namun, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penerapan pedoman pelaporan keuangan organisasi nonlaba belum terealisasi dengan baik, dengan kata lain kesadaran organisasi nonlaba masih kurang terkait hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 diterapkan dengan tujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atau informasi yang memiliki relevansi tinggi serta lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atas dana yang didapat, sehingga laporan keuangan dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pengguna laporan keuangan tersebut (*stakeholders*).

Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari telah menerapkan pelaporan keuangan kepada publik atau jamaah secara transparan tetapi belum akuntabilitas. Hal disebabkan karena masjid ini belum menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 dalam pelaporan keuangannya. Hal ini terlihat dari data laporan keuangan yang diperoleh bahwa masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari hanya melakukan pencatatan berupa kas masuk dan kas keluar.

Menurut Ibrahim (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pengakuan pertanggungjawaban secara terbuka tentang apa yang telah dikerjakan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah atas suatu kegiatan yang telah dikerjakan. Dimana akuntabilitas bertujuan

agar terciptanya kepercayaan publik pada pengelolaan keuangan suatu organisasi.

Akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai melalui penyajian laporan keuangan yang baik, yaitu sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Apabila ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ula dkk. (2021) menyatakan bahwa Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember belum melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini disebabkan karena masjid ini belum menerapkan ISAK 35 dalam pelaporan keuangannya, namun sudah mencapai transparansi yang baik. Penelitian yang sejenis, dilakukan oleh Afifah & Faturrahman (2021) dan Safitri (2021) keduanya memperoleh hasil bahwa akuntabilitas belum dicapai dalam penerapannya. Dari ketiga penelitian di atas, diketahui penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya belum menerapkan standar pelaporan keuangan bagi organisasi nonlaba. Dimana pada penelitian tersebut pencatatan laporan keuangannya masih sangat sederhana yaitu berupa catatan kas masuk dan kas keluar saja. Hal ini disebabkan karena para pengurus masjid belum mengetahui adanya standar pencatatan laporan keuangan seperti ISAK 35.

Akuntabilitas dan transparansi tentunya memiliki dampak besar bagi kelangsungan dan kredibilitas suatu organisasi. Adanya laporan keuangan dalam pengelolaan dana yang diterima oleh organisasi keagamaan masjid merupakan cerminan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan (Julkarnain, 2018). Oleh sebab itu, implementasi standar pelaporan keuangan menjadi hal yang penting diperhatikan dalam organisasi, sehingga organisasi dapat dinamis, efisien dan berkembang dengan baik, termasuk dalam organisasi keagamaan masjid.

Akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah organisasi akan meningkat jika didalam organisasi itu menggunakan

standar laporan keuangan yang berlaku. Tercapainya akuntabilitas dan transparansi, akan berdampak pada keberlangsungan organisasi nonlaba yang lebih terjamin kedepannya karena kepercayaan stakeholders, jamaah, donatur atau lainnya meningkat dalam organisasi itu sehingga para stakeholder dan donatur tidak ragu lagi untuk menyumbangkan dananya di masjid sebab mereka menyakini bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kemakmuran dan kepentingan masjid. Penelitian yang dilakukan oleh Saiffuddin & Wahidahwati (2020) menyatakan bahwa Masjid Raya Sabital Muhtadin sudah menerapkan standar akuntansi keuangan (pada tahun tersebut masih berlaku PSAK 45, sebelum ISAK 35) pada pelaporan keuangannya dimana masjid Raya Sabital Muhtadin membuat empat jenis laporan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku pada saat itu yaitu, laporan keuangan laporan arus kas, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan pada masjid Masjid Raya Sabital Muhtadin berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan masjid sehingga masjid tersebut semakin berkembang dengan baik.

Penyusunan laporan keuangan masjid dengan menggunakan ISAK 35 maka sedikitnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Lebih dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru atau pergerakan positif bagi masjid-masjid lain yang ada di kota Kendari, atau bahkan di luar itu untuk ikut serta dalam menerapkan ISAK 35 sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Semakin besar dana yang dikelola, maka tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi masjid juga semakin tinggi.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan Nirlaba

Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba

Ikatan Akuntansi Indonesia (2011) menerangkan bahwa standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan berwenang. Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi keuangan di Indonesia di susun oleh Dewan standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi komite penyusunan Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa akan datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut berkurang dengan berjalannya.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 merupakan standar khusus entitas nirlaba. Karakteristik entitas nirlaba sangat berbeda dengan entitas bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Dimana perbedaanya terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau

bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, contohnya penerimaan sumbangan.

Metode Pencatatan Organisasi Nirlaba

Dalam akuntansi terdapat metode pencatatan yang membedakan cara pencatatan pendapatan dan biaya dalam laporan pendapat dan biaya organisasi nirlaba secara signifikan. Adapun metode tersebut adalah:

1. Metode Basis Kas

Bastin (2007:80) menyatakan bahwa basis kas (*cash basis*) adalah teknik pencatatan yang mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Adapun karakteristik *cash basis* adalah sebagai berikut: 1) mengukur aliran sumber kas; 2) transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan; 3) menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan peraturan lain; 4) menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan.

2. Metode Basis Akrua

Bastin (2007:80) menyatakan bahwa basis akrual (*accrual basis*) adalah teknik pencatatan yang mengakui dan mencatat transaksi atas kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat perolehan. Cara pembukuan *accrual basis* membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaan terjadi, sudah diterima atau belum, serta membukukan pembelanjaan pada saat liabilitas terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan sudah atau belum.

Organisasi Nirlaba

Kurniasari (2011) menyatakan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi

nirlaba meliputi masjid, sekolah negeri, rumah sakit dan lain-lain.

Organisasi nirlaba bisa berbentuk organisasi kesejahteraan dan kesehatan, lembaga dan universitas. Yang dimana setiap jenis organisasi tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan organisasi, yaitu untuk memberikan jasa dan tidak mencari laba. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:1) bahwa organisasi nirlaba (*non profit organizing*) adalah organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari keuntungan (laba). Menurut Renyowijoyo (2008:270) organisasi nirlaba adalah organisasi yang menerima kontribusi sumbangan dana dalam jumlah signifikan dari pemberi dana yang tidak mengharapkan pengembalian.

Menurut Mahsun (2009) organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan jasa bertujuan mendapatkan laba dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis.

Karakteristik Organisasi Nirlaba

Berdasarkan PSAK 45 halaman 2 paragraf 01, dimana suatu organisasi dapat dikelompokkan sebagai organisasi nirlaba bila memenuhi, kriteria sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas

nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Tujuan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan utama dari organisasi nirlaba adalah pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik. Jadi organisasi nirlaba dapat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam mewujudkan negara dengan masyarakat yang sejahtera. Karena tidak berorientasi pada keuntungan.

Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba ISAK 35

Konsep Dasar ISAK 35

Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Dimana sebelumnya untuk organisasi nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) revisi 2017 yang sekarang telah diganti menjadi ISAK 35. PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, dimana perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto, yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer

menjadi aset neto dengan pembatasan (*with restrictions*) akan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan (*without restrictions*), oleh karena itu akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Interpreasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) menjelaskan perincian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang telah disajikan seperti berikut:

1. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa "Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam sendiri." Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba.
2. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas nonlaba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan aktivitas nonlaba dalam Interpretasi ini selanjutnya merujuk kepada entitas berorientasi nonlaba.
3. Karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang

sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

4. Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

Interpretasi

1. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2. Entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh entitas berorientasi nonlaba mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan (*with restrictions*) atau tidak adanya pembatasan (*without restrictions*) oleh pemberi sumber daya.
3. Entitas berorientasi nonlaba juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, penyesuaian atas penggunaan judul 'laporan perubahan aset neto' daripada 'laporan perubahan ekuitas'. Penyesuaian atas judul laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi

yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.

4. Entitas berorientasi nonlaba tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

Ruang Lingkup dan Permasalahan ISAK 35

- a) Ruang lingkup ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba sebagai Interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 05.
- b) Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- c) Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nonlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi nonlaba dari entitas bisnis berorientasi laba.
- d) Entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum.

Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK 35

Menurut PSAK 1 Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu

entitas. Selain itu, laporan keuangan ini juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan kontribusi kepada pemilik dan arus kas yang disertakan dengan informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) tentang ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain:

1. Laporan posisi keuangan

Laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan keuangan entitas mencakup secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

a. Aset

Sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas (IAI, 2011). Pada umumnya entitas menyajikan dan mengumpulkan aset kelompok yang homogen. Diantaranya adalah:

1. Kas dan setara kas
2. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain

3. Persediaan

4. Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka
5. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
6. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa.

b. Liabilitas

Liabilitas merupakan klaim dari pihak ketiga atas aset entitas. Liabilitas disusun berdasarkan urutan jatuh tempo dari liabilitas/kewajiban tersebut. Kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun digolongkan kewajiban lancar, sedangkan kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun digolongkan kepada kewajiban jangka panjang. Contoh urutan dan penyajian liabilitas/kewajiban adalah:

- 1) Utang
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka
- 3) Utang Lainnya
- 4) Utang Jangka Panjang

c. Aset Neto

Dalam laporan keuangan komersial, aset neto dikenal sebagai modal. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Aset neto berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya menjadi dua klasifikasi aset neto yaitu:

- 1) Aset Neto Tanpa Pembatasan (*Without Restrictions*).

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak ada batasan terhadap aset tersebut, misalnya sumbangan yang diberikan oleh si donatur, dimana donatur tidak secara jelas mencantumkan jangka waktu dari donasinya tadi hanya untuk memberikan donasi untuk entitas tersebut sehingga pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan entitas dapat

mempergunakannya untuk kebutuhan entitas.

- 2) Aset Neto dengan Pembatasan (*With Restrictions*).

Aset neto dengan pembatasan, menggabungkan klasifikasi aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan akan mengurangi kompleksitas. Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang berkaitan dengan sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, dan aset neto yang digunakan untuk selamanya, seperti tanah dan bangunan yang diberikan untuk tujuan tertentu, sehingga pemasukan dan pengeluarannya itu diluar entitas seperti kas anak yatim, kas fakir miskin dan lain lain.

- 3) Laporan penghasilan komprehensif
Tujuan utama laporan penghasilan komprehensif adalah untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menyediakan informasi mengenai:

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah pendapatan
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain mengenai jumlah beban
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

- 4) Laporan perubahan aset neto

Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) merupakan laporan perubahan aset neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Pada laporan perubahan aset neto entitas menyajikan informasi

penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

5) Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai jumlah penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan selama satu periode tertentu (IAI:2017). Menurut Rudianto (2012) dalam melakukan penyusunan laporan arus kas terdapat tiga aktivitas utama yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan sebagai penunjang aktivitas utama pada organisasi tersebut. Selain itu juga terdapat aktivitas investasi yang berisi pengadaan peralatan yang dapat digunakan sebagai penunjang atau fasilitas yang diberikan untuk dapat digunakan secara bersama. Aktivitas yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan, dimana aktivitas pendanaan ini dapat berupa peminjaman dana ataupun pemerolehan atas suatu aset. Aktivitas pendanaan ini bertujuan untuk dapat memperkitakan klaim atas arus kas yang akan datang.

6) Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian pelengkap dari laporan keuangan yang memuat berbagai informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan diatas. Pada dasarnya catatan atas laporan keuangan memuat informasi yang sifatnya kualitatif, akan tetapi dapat juga berbentuk kuantitatif dengan tujuan untuk menambah informasi yang terdapat pada laporan

keuangan tersebut. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif. CALK juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar (IAI, 2007: 1.13)

Tempat Ibadah sebagai Sebuah Entitas

Menurut Bastin (2007:216) menyatakan bahwa Organisasi tempat ibadah adalah organisasi keagamaan. Secara etimologis, organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai organisasi yang berfokus terhadap kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang di anut setiap manusia. Jika didasarkan pada definisi tersebut, organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan seperti masjid, mushola, gereja, kuil, klenteng, wihara maupun pura. Tempat ibadah adalah sebuah organisasi yang masuk kedalam organisasi nirlaba, karena organisasi peribadatan tidak bermotif untuk mencari keuntungan atau laba serta bertujuan untuk melayani ritual ibadah umat.

Tujuan Organisasi Peribadatan

1. Untuk melayani umat atau pengikut agamanya

Bastin (2007) menyatakan bahwa tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan.

2. Sosial kemasyarakatan dan pendidikan.

Bastin (2007) pelayanan bagi umat dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Secara sempit pelayanan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan kepada umatnya bertujuan agar proses peribadatan didalam organisasi keagamaan tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin. Semua kebutuhan umat terkait dalam proses ritual peribadatan harus tersedia dan terjaga selama waktu yang tidak terbatas. Namun, dalam konteks pelayanan secara luas dapat di maknai sebagai pelayanan kepada umat secara menyeluruh menyangkut berbagai aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat dari umat beragama tersebut.

3. Tujuan keuangan

Tujuan keuangan di tujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelaksanaan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut. Di dalam tujuan keuangan ini bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa profit tetapi lebih kearah bagaimana membiayai kebutuhan beribadah umat dalam tempat ibadah dan fungsi sosial keagamaan lainnya.

Fungsi dan Peran Organisasi Peribadatan

- a. Tempat beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah swt.
- b. Tempat pembinaan kesadaran dalam beragama bagi umat beraga tersebut.

- c. Tempat bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan umat muslim
- d. Tempat berkumpulnya umat muslimin(silaturahmi)
- e. Tempat membina kerukunan dan gotong royong antar-umat muslim dengan memperkokoh ikatan batin dan rasa sepersaudaraan seiman
- f. Pusat pendidikan dan pengajaran agama islam bagi umat muslim disekitarnya
- g. Tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan mengelolanya.
- h. Tempat melaksanakan pengaturan dan pengawasan sosial.

Akuntabilitas pada Organisasi Peribadatan

Dalam pandangan Islam akuntabilitas tidak ditujukan hanya kepada masyarakat (*stakeholders*) sebagai pertanggungjawaban horizontal, namun juga kepada Allah Swt yaitu sebagai pertanggungjawaban vertikal (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan aktivitas atau upaya untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dengan proses-proses akuntansi. Pada organisasi keagamaan pengelola (pengurus dan pengawas) organisasi bertanggung jawab kepada umat yang dimana di sampaikan dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat yang termaksud kedalam organisasi keagamaan itu sendiri.

Pada organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang penting dalam mengelola masjid (Ayub, 1996). Jika pengelolaan masjid dapat dilakukan dengan baik, itu pertanda pengurus masjid adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Pertanggung jawaban organisasi keagamaan dapat bersifat:

1. Vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada pembina apabila organisasi keagamaan itu memakai sistem struktur.

2. Horizontal

Pertanggung jawaban horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan.

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan suatu organisasi. Tingginya kepercayaan publik yang ditimbulkan dapat mendorong partisipasi menjadi lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen. Lebih utama lagi tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja suatu organisasi sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan terpercaya (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas merupakan indikator dalam mengukur apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu sudah sesuai dengan rencana, pedoman, dan aturan yang berlaku. Akuntabilitas dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua aspek.

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas laporan keuangan dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima indikator akuntabilitas yang terdapat dalam pengelolaan keuangan masjid yang terdiri dari:

1. *Input* (Pemasukan)

Input adalah suatu alat ukur berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, material, sumber daya manusia yang masuk dan dipergunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas

2. *Output* (Pengeluaran)

Output adalah suatu alat ukur berdasarkan produk yang dihasilkan dari kegiatan atau program yang sesuai dengan masukan yang digunakan. Menurut Mujilan (2012) pengeluaran

adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perindustrian barang atau jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran.

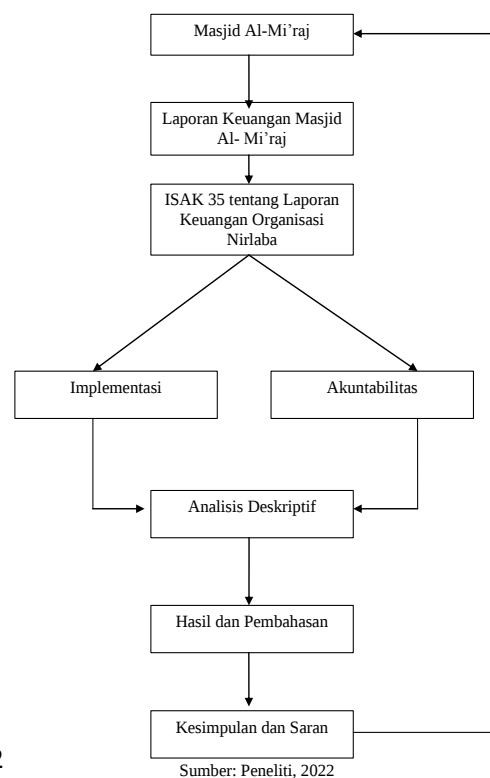
3. *Outcome* (Hasil)

Outcome adalah suatu alat ukur berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas pengeluaran yang sudah dilaksanakan.

4. *Benefit* (Manfaat)

Benefit adalah suatu alat ukur berdasarkan manfaat yang diperoleh dan dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dari hasil yang telah dikeluarkan.

Kerangka Konseptual



22

METODE

Objek penelitian ini adalah evaluasi implementasi akuntabilitas pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 35 tentang organisasi keagamaan yang berlokasi di Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga informan yang dianggap

bisa memberikan informasi yang akurat, informan itu terdiri dari: Ketua Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari, bendahara Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari dan jamaah yang ada di sekitar Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, laporan keuangan dan ISAK 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil dari penelitian di Masjid Al-Mi'raj kecamatan Kadia Kota Kendari. Terdapat data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan masjid, menggambarkan aset (harta), liabilitas (utang) dan aset neto (modal) masjid. Dalam laporan posisi keuangan kita dapat melihat akhir dari kas masjid, total nilai aset dari masjid utang yang harus dilunasi oleh masjid. Kemudian untuk saldo akhir aset neto, nilainya diambil dari laporan penghasilan komprehensif yang mana telah mengalami kenaikan atau penurunan.

Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari			
Laporan Posisi Keuangan			
Januari s/d Desember 2021			
(dalam jutaan rupiah)			
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	Rp	53.858.450	
Perlengkapan	Rp	2.134.000	
Investasi Jangka pendek		-	
Aset lancar lain		-	
Total aset lancar	Rp	55.992.450	
Aset tidak lancar			
Peralatan	Rp	75.203.600	
Investasi jangka panjang		-	
Total aset tidak lancar	Rp	75.203.600	
Total Aset	Rp	131.196.050	
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek		-	
Pendapatan diterima di muka		-	
Utang jangka pendek		-	
Total Liabilitas jangka pendek		-	
Liabilitas jangka panjang		-	
Utang jangka panjang		-	
Liabilitas imbalan kerja		-	
Total Liabilitas jangka panjang		-	
ASET NETO			
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	Rp	131.196.050	
Penghasilan Komprehensif lain		-	
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya (catatan B)		-	
Total Aset Neto	Rp	131.196.050	

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Dalam laporan penghasilan komprehensif tahun 2021 yang sesuai dengan ISAK 35 pada masjid Al-Mi'raj akan menyajikan semua pendapatan dan beban yang telah terjadi di dalam masjid, berikut adalah laporan penghasilan komprehensif Masjid

Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
Januari s/d Desember 2021		
(dalam jutaan rupiah)		
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Pendapatan tiap jum'at	Rp	88.176.000
Pendapatan harian	Rp	222.000
Sumbangan	Rp	71.965.000
Pend. Toko	Rp	9.500.000
Pend. Kotak amal tarawih	Rp	11.976.000
Pend. Hari raya	Rp	11.145.000
Pend. Infaq/sadaqoh	Rp	2.295.000
Total Pendapatan	Rp	195.279.000
Beban		
Beban Intensih tiap jum'at	Rp	10.250.000
Beban Intensih tiap bulan	Rp	21.000.000
Beban Upah tukang	Rp	25.050.000
Beban peribadatan	Rp	10.770.000
Beban lain-lain	Rp	7.077.000
Total Beban	Rp	74.147.000
Surplus (Defisit)	Rp	121.132.000
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
sumbangan	-	
Total Pendapatan		
Beban		
Kerugian akibat kebakaran	-	
Surplus (Defisit)		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	Rp	121.132.000

3. Laporan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan aset neto yang terjadi di dalam suatu entitas nonlaba. Laporan perubahan aset neto terdiri atas dua, yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Berikut adalah aset neto yang sesuai dengan ISAK 35 pada masjid Al-Mi'raj.

Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari		
Laporan Aset Neto		
Januari s/d Desember 2021		
(dalam jutaan rupiah)		
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	Rp	10.064.050
Surplus tahun berjalan	Rp	121.132.000
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan		
Saldo Akhir	Rp	131.196.050
Penghasilan komprehensif lain		
Saldo awal	-	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	
Saldo akhir	-	
Total		
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	-	
Surplus tahun berjalan	-	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	-	
Saldo akhir	-	
TOTAL ASET NETO	Rp	131.196.050

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan untuk melihat saldo akhir dari suatu entitas dengan melihat arus kas pemasukan dan pengeluaran. Laporan arus kas hanya menunjukkan kas masuk dan kas keluar saja, jika tidak sama dengan saldo kas yang ada di dalam laporan posisi keuangan kemungkinan telah terjadi salah catat. Berikut adalah laporan arus kas masjid al-mi'raj yang sesuai dengan ISAK 35:

Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari		
Laporan Arus Kas		
Januari s/d Desember 2021		
(dalam jutaan rupiah)		
AKTIVITAS OPERASI		
Pend. Setiap jum'at	Rp	88.176.000
Pend. Kotak amal harian	Rp	222.000
Sumbangan	Rp	71.965.000
Pend. Dari toko	Rp	9.500.000
Pend. Kotak amal tarawih	Rp	11.976.000
Pend. Hari raya	Rp	11.145.000
Pend. Infaq/sadaqoh	Rp	2.295.000
Pembelian perlengkapan	Rp	(2.134.000)
Beban tiap jum'at	Rp	(10.250.000)
Beban tiap bulan	Rp	(21.000.000)
Beban upah tukang	Rp	(25.050.000)
Beban peribadatan	Rp	(10.770.000)
Beban lain-lain	Rp	(7.077.000)
Kas neto dari aktivitas operasi	Rp	118.998.000
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Peralatan	Rp	75.203.600
Penerimaan dari penjualan investasi	-	
Kas neto dari aktivitas investasi	Rp	75.203.600
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi	-	
Investasi bangunan	-	
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Pembayaran liabilitas jangka panjang	-	
Kas neto dari aktivitas pendanaan	-	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	Rp	43.794.400
	Rp	10.064.050
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	Rp	53.858.450

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh bahwa akuntabilitas pada masjid Al-Miraj Kecamatan Kadia Kota Kendari sudah akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya akan tetapi masih memerlukan perbaikan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas di masjid tersebut. Akuntabilitas pada masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari dapat ditingkatkan dengan penggunaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Intrepetasi Standar

Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 dalam pelaporan keuangannya.

Siklus akuntansi organisasi nirlaba yang sebenarnya dimulai dari tahap pencatatan, dimana pada tahap ini kegiatan terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar, selanjutnya tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutup, membuat ayat jurnal pembalik. Selanjutnya adalah tahap pelaporan dimana pada tahap ini laporan yang disajikan berupa laporan surplus-defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan (Kusufi, 2016). Sedangkan menurut ISAK 35 laporan keuangan masjid yang seharusnya disajikan yaitu laporan keuangan yang terdiri dari: laporan keuangan, laporan perubahan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Ridwan (2020) tentang akuntabilitas dan transparansi menunjukkan bahwa masjid masih menggunakan laporan keuangan secara sederhana yaitu berupa pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja, yang kemudian pendapatan dan pengeluaran itu disampaikan di hadapan para jamaah ketika sholat jum'at. Penelitian yang dilakukan oleh Lasfita & Muslimin (2020) penerapan ISAK 35 pada organisasi keagamaan masjid menunjukkan bahwa masjid masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 karena dalam melakukan penyusunan pencatatan keuangan masjid, masih mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya yaitu hanya berupa

pencatatan kas masuk dan kas keluar (dicatat secara manual).

Dilihat dari penelitian diatas maka akuntabilitas dapat ditingkatkan lagi dengan penyajian laporan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana laporan keuangan yang disajikan pada Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari masih sangat sederhana yaitu berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar saja. Sehingga Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari perlu menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu ISAK 35 dalam pelaporan keuangannya. Dengan adanya pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu ISAK 35 maka masjid Al Mi'raj harus mulai menyusun laporan keuangannya sesuai dengan siklus akuntansi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari sudah dilakukan secara transparan namun masih perlu adanya perbaikan untuk kedepannya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih baik lagi.
2. Implementasi ISAK 35 dalam pengelolaan laporan keuangan Masjid Al Mi'raj Kecamatan Kadia Kota Kendari, belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yaitu ISAK 35, hal ini dapat dilihat dari pelaporan keuangan masjid yang masih sangat sederhana yaitu berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar dalam laporan keuangannya.

Saran

Sebagai salah satu masjid kecamatan yang ada di Kecamatan Kadia Kota Kendari sebaiknya Masjid Al-Miraj Kecamatan Kadia Kota Kendari menggunakan ISAK 35 sebagai standar dalam pelaporan keuangannya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya, yaitu hanya berfokus pada satu objek masjid, data penelitian yang digunakan hanya satu tahun dan masjid yang digunakan yaitu masjid kecamatan. Akan tetapi, penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi atau pustaka ataupun sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan beberapa masjid atau lembaga lainnya seperti yayasan sebagai objek penelitian serta masjid yang digunakan untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan masjid kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Faturrahman, F. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi isak 35 pada yayasan an-nahl bintan. *JAJA: Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 24–34.
- Andasari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika. Ekonomi Universitas Kadiri*, 1 (2), 143–152. <https://doi.org/10.30737/ekonika.vli2.12>
- Ayub, M. E. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Yogyakarta. Erlangga.
- Bastin. (2007). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta. Erlangga.
- Dwikasmanto, Y. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis Berdasarkan Isak 35. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 6(2), 46–64.
- Hery. (2020). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat, W. W. (2020). *Dasar Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (IAI). (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Penyajian Laporan Keuangan (Revisi Tahun 1998) Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan IAI*. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (IAI). (2011). *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (IAI). (2018). *DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia. www.iaiglobal.or.id%0A
- Ikatan Akuntansi Indonesia, I. (2018). *Penyajian Laporan Keuangan*. IAI.
- Iqbal Subhan Maulana, M. R. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAJA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.

- 26 | Yusuf Jaya Saputra¹, Mahmudin A. Sabilalo² dan Wa Ode Milawati AS³. Implementasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Tentang Organisasi Keagamaan (Studi Kasus di Masjid Al-mi'raj Kota Kendari)
- Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 5, (2).
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. PT RAJAGRAFINDO PERSABDA.
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 45). *Jurnal Muqtasid*, Vol 2. No.
- Kusufi, M. S. (2016). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Lasfita, N., & Muslimin. (2020). Penerapan ISAK No. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al- Mabrur Sukolilo Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(35), 65–68.
- Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Jakarta.
- Mangkona, Sri Wardhana Saleh & Walaundouw, S. K. (2015). Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Masjid Nurul Huda Kawangkoan. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*, Volume 3 N. ISSN%0A2303 – 1774
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *No Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Title.*
- Octisari, S. K., Murdijaningsih, T., & Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648>
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 61–74.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta. Erlangga.
- Safitri, A. dkk. (2021). *Penyusunan laporan keuangan berdasarkan isak 35 pada tpq al-barokah pekalongan*. 2(1), 38–54.
- Saiffuddin, A., & Wahidahwati, D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan Psak No.45 Tentang Pelaporan Organisasi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(45).
- Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Sidoarjo. Deepublish.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152–162.
<https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>

